

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi salah satu perhatian pemerintah di negara manapun, seperti di negara Indonesia, oleh karena itu hal ini menjadi fokus dari pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar tinggal di pedesaan yang sulit dijangkau. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena berbagai sebab, dapat dikatakan sebagai kemiskinan, salah satunya adalah pendapatan rendah. Masalah kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kualitas hidup yang buruk, upah minimum yang tidak sebanding dengan biaya hidup, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin setiap tahun.

Kemiskinan menghalangi seseorang untuk memperoleh hak seperti (pangan, sandang, papan) yang mereka butuhkan sebagai manusia. Kemiskinan memiliki banyak aspek, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Tingkatan sosial adalah stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial antara si kaya dan si miskin, sedangkan level ekonomi meliputi pendapatan pribadi dan ekonomi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan dipandang sebagai suatu perekonomian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau nonpangan dan dapat diukur dari pengeluaran. Ada banyak penyebab kemiskinan, termasuk kemiskinan struktural, kemiskinan budaya dan kemiskinan alam atau kemiskinan natural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena struktur yang membuat sebagian kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana tentang ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Kemiskinan

kultural atau kemiskinan budaya terindikasi dalam perilaku hidup boros, tingkat tabungan rendah, serta adanya sikap menerima atau pasrah terhadap lingkungan kemiskinan. Di Indonesia tidaklah sedikit penduduk miskin yang disebabkan oleh budaya mereka sendiri, sehingga hal ini menyebabkan setiap tahun tingkat penduduk miskin cenderung naik. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terintegrasi Nasir, dkk. (2008).

Tabel 1.1 mencantumkan data penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Pada Tabel 1.1 berikut dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir, berfluktuasi. Pada tahun 2010 di Kabupaten Kebumen, angka kemiskinan mencapai 263.000 ribu jiwa, kemudian naik 279.400 ribu jiwa pada tahun 2011, kemudian terus menurun di setiap tahunnya hingga tahun 2019 mencapai angka 201.300 ribu jiwa.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen (Ribu Jiwa)

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
2010	263.000
2011	279.400
2012	258.500
2013	251.100
2014	242.300
2015	241.900
2016	235.900
2017	233.400
2018	208.700
2019	201.300

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan data presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih tidak merata.

Upah adalah imbalan yang dibayarkan kepada pekerja sementara atau pekerja harian sesuai dengan perjanjian pembayaran yang disepakati. Jika gaji karyawan lebih tinggi berarti jabatannya lebih tinggi, statusnya meningkat, dan kepuasan juga meningkat, maka kepuasan kerja juga meningkat (Hasibun, 2013).

Menurut ketentuan Komite Riset Pengupahan Nasional, upah adalah upah yang diterima sebagai pekerjaan, yang dapat menjamin kelangsungan hidup layak bagi manusia dan produksi. Hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan oleh perjanjian kerja yang ditandatangani antara majikan dengan penerima pekerjaan (Yasin, 2012).

Kebijakan upah minimum juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah gaji bulanan yang terdiri dari gaji pokok (termasuk tunjangan tetap). Kebijakan upah minimum merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan pemerintah yang dicapai dengan menghitung kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang dan papan) dan jaring pengaman sosial (dengan menghitung kebutuhan jasa pendidikan dan transportasi dasar).

Indikator kesehatan dapat dilihat dari populasi angka harapan hidup. Angka harapan hidup (AHH) adalah salah satu indikatornya. Status kesehatan penduduk digunakan untuk menilai keberhasilan program pemerintah. Badan Pusat Statistik mendefinisikan harapan hidup sebagai umur rata-rata dimana orang-orang sukses akan tetap bertahan. Pada suatu tahun tertentu, mencapai usia x tahun dengan angka kematian umum di dalam komunitas.

Harapan hidup adalah perkiraan umur dengan asumsi bahwa angka kematian rata-rata tidak berubah, menurut usia.

Indikator harapan hidup digunakan untuk menilai kesehatan penduduk. Artinya, seiring dengan meningkatnya indikator usia harapan hidup, maka kesehatan penduduk juga akan meningkat. Meningkatkan dan Memperpanjang Angka Harapan Hidup Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2014), rata-rata angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 1980 hanya 52,2 tahun. Jika kualitas hidup penduduk Indonesia ditingkatkan maka angka harapan hidup akan meningkat dari tahun 2000 menjadi 64,5 tahun, dan pada tahun 2010 hanya menjadi 68 tahun.

Menurut sensus Indonesia tahun 1971, usia harapan hidup laki-laki adalah 44,2 tahun, dan usia harapan hidup perempuan adalah 47,2 tahun. Pada tahun 2010 usia harapan hidup akan terus meningkat, mencapai 67,9 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Usia harapan hidup di Indonesia pada tahun 2015 adalah 71 tahun untuk laki-laki dan 72,8 tahun untuk perempuan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2035, dengan laki-laki mencapai usia 70,6 tahun dan perempuan mencapai 74,4 tahun (BKKBN, 2014).

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS (Harapan Lama Sekolah) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk target tersebut, target ditetapkan pada tahun 2017 atau mencapai kondisi kinerja 100,56%. Target yang diharapkan untuk tahun ajaran 2017 adalah 12,54. Harapan lama sekolah pemerintahan Kebumen tahun 2017 adalah 12,61 tahun. Grafik menunjukkan perkiraan waktu pendaftaran di masa mendatang. Untuk anak usia tertentu (7 tahun ke atas), masa depan setelah lulus SMA adalah 12,61 tahun, atau setara dengan gelar magister. Tahun akademik yang diharapkan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen meningkat dari 2015 menjadi 2016 dari 12,49 pada 2015 menjadi 12,61 pada 2016 dan 2017.

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan sosial dan pembangunan sosial ekonomi. Tidak hanya itu, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber daya. Pendidikan yang berkualitas akan melatih talenta terdidik yang berkualitas dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya berharap warga dengan kemampuannya masing-masing bisa lebih banyak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan agar bisa hidup lebih baik di masa depan.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio* disingkat DR) mengacu pada rasio (rasio) antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ke atas 65) dan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka beban tanggungan maka semakin berat beban penduduk usia produktif, karena mereka harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia tidak produktif, begitu pula sebaliknya. Secara kasar, rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara, terlepas dari apakah negara tersebut tergolong negara maju (LDFE, UI).

Dependency Ratio merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan status ekonomi suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Rasio ketergantungan juga dapat menunjukkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Ketika *dependency ratio* tinggi, pertumbuhan ekonomi terganggu atau pendapatan masyarakat rendah, *dependency ratio* yang rendah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ketika *dependency ratio* tinggi, karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk investasi dan tabungan, dan semua pendapatan digunakan untuk produksi baik bagi yang muda maupun yang tua dengan pekerjaan yang sesuai.

Dependency Ratio yang tinggi dapat menghambat perkembangan negara berkembang, termasuk Indonesia, karena sebagian pendapatan kelompok produktif harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum memproduksi atau memproduksinya. Ketika jumlah penduduk kecil, lebih mudah untuk memobilisasi dana dan anggaran pemerintah untuk investasi produktif. Dalam kasus *Dependency Ratio* yang rendah, makanan dan bahan mentah lainnya dapat disimpan dan penduduk yang berkualitas tinggi dapat hidup, sehingga meningkatkan harapan hidup daerah tersebut (Andy Nuru). Adiana Reski Agus, 2016).

Dari latar belakang seperti diatas, penelitian akan menguraikan baik secara menyuluruh maupun secara terperinci. Maka judul yang diangkat dalam penelitian **“Pengaruh Upah Minimum, Harapan Hidup, Lama Sekolah dan *Dependency Ratio* Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Usia Harapan Hidup (UHH) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah *Dependency Ratio* (DR) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Usia Harapan Hidup (UHH) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Dependency Ratio* (DR) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian tetap terarah pada permasalahan, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup penelitian yakni faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diukur dari jumlah penduduk miskin dan faktor yang mempengaruhinya yaitu Upah Minimum Kabupaten, Usia Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan *Dependency Ratio*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk menganalisis Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai hal yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin.